

PEMBERITAAN MEDIA



LULUK'S UPDATE

EDISI
2-8 September 2019

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*



Perubahan Iklim



Komitmen Kementerian dan Pemprov Kunci Pemenuhan Target NDC Indonesia

- Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen jika dilakukan bersama dengan pihak atau negara lain. Hal tersebut tercantum dalam NDC Indonesia.
- Global Green Growth Institute (GGGI) menyebut komitmen kementerian dan pemerintah provinsi (pemprov) menjadi kunci utama Indonesia untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC)
- NDC merupakan bagian penting dari Kesepakatan Paris yang berisi pernyataan komitmen negara para pihak melalui UNFCCC
- Saat ini, sudah diidentifikasi 6 kementerian, yakni KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait langsung dengan penurunan emisi di dalam NDC Indonesia

Komitmen Kementerian dan Pemprov Kunci Pemenuhan Target NDC Indonesia

- setiap kementerian yang telah ditetapkan tersebut harus menentukan berapa besaran emisi yang bisa mereka kurangi dan diikat dalam bentuk peraturan.
- Peraturan tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah bisa berupa Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Presiden dan bersifat lintas sektoral.
- selain ada target pengurangan emisi di tiap kementerian juga harus dilakukan pula di level pemerintah provinsi. Jika itu tidak dilakukan maka GGGI mengkhawatirkan upaya yang telah dirancang di pusat akan gagal pada tingkat bawah.

Komitmen Kementerian dan Pemprov Kunci Pemenuhan Target NDC Indonesia

- Sebagai contoh penurunan emisi di sektor kehutanan jika merujuk pada undang-undang terdapat tingkatan level nasional dan subnasional. Jika pemerintah hanya mengatur pengurangan emisi di tingkat nasional maka hutan yang dikelola oleh subnasional akan terabaikan dari target pengurangan emisi tersebut.
- Selain itu, upaya penurunan emisi di tingkat provinsi juga harus diikat dengan peraturan. Jika tidak target pengurangan emisi Indonesia tidak akan tercapai.

- ✓ Program PCPF-CF Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) di Kaltim adalah yang pertama di Indonesia.
- ✓ Program ini didanai oleh Bank Dunia
- ✓ Dalam kurun waktu tersebut, Kaltim ditarget mengimplementasikan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dalam 5 tahun mulai tahun 2020-2024.
- ✓ Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kalimantan Timur berharap FCPF-CF 2020-2024 terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

- ✓ Dengan ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN), perlu pengkajian mendalam karena IKN membutuhkan lahan tidak sedikit
- ✓ Jika membangun dengan penebangan hutan secara masif, maka akan menyebabkan peningkatan emisi GRK Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan sebagai wilayah IKN merupakan wilayah terbuka dengan stok karbon rendah.
- ✓ Artinya jika dibangun di wilayah tersebut tidak akan berpengaruh signifikan kecuali jika pelaksanaannya memabat hutan primer dan sekunder

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Malaysia Akan Kirim Nota Diplomatik

- Pemerintah Malaysia akan mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Indonesia.
- Rencana tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan dan Perubahan Iklim Malaysia
- Nota diplomatik berisi desakan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil aksi dalam kebakaran lahan yang menimbulkan kabut asap sampai ke wilayah Malaysia.
- Dalam nota diplomatik tersebut pemerintah Malaysia meminta pemerintah Indonesia mencegah kebakaran lahan tidak terjadi lagi.

- Dikutip dari The Star, terdeteksi 17 titik panas di Malaysia, yaitu 12 di Sarawak, 2 di Johor, 2 di Pahang dan 1 di Perak.
- Indeks polutan udara (API) beberapa daerah di Sarawak ada di level antara 101 dan 200 sejak 6 September 2019 pagi

- Siang hari, indeks polutan udara di Sri Aman mencapai 176, Miri 142, Kuching 140, Samarahan 132, Sibu 124, Sarikei 115 dan Mukah 102.
- Laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN pada 5/9/2019 citra satelit mendeteksi 1.393 titik api ada di Indonesia, yaitu 306 di Sumatera dan 1.087 di Kalimantan.

- Pada pertemuan komite kerja tingkat sub-regional pada 6 Agustus lalu, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura dan Thailand berjanji bekerja sama mengatasi kabut asap.
- Malaysia belum menerima permintaan dari Indonesia untuk membantu mengatasi kebakaran lahan di sana.

Upaya Pemerintah

- ✓ Awal September terjadi peningkatan titik api dan karhutla di Kalimantan.
- ✓ Para pihak di lapangan pun diinstruksikan meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya pemadaman
- ✓ Pemadaman baik darat dan udara dikerahkan
- ✓ 26.790.400 liter air dijatuhkan untuk pemadaman dari udara di Kalimantan Tengah
- ✓ Di Kalbar water bombing dilakukan 16.861 sorti dengan 45.999.140 liter air
- ✓ Prediksi BMKG masih menunjukkan potensi sangat mudah terbakar di wilayah Sumatera (Jambi, Sumatera Selatan), Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kaltara)

Pendanaan Penanganan Karhutla

- ✓ Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengucurkan dana Rp 2,3 miliar untuk menangani karhutla hingga 28 Agustus 2019, dari Rp 2,7 miliar yang dianggarkan
- ✓ untuk pembentukan tim satgas karhutla termasuk tahapan penanggulangan kebakaran lahan.
- ✓ anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui BNPB dan masuk dalam pos belanja tidak terduga atau BTT.
- ✓ Sisa anggaran yang tidak digunakan dikembalikan ke kas daerah dan akan digunakan jika terjadi musibah atau kejadian tak terduga terkait kebencanaan.

Karhutla di Riau

- BMKG Pekanbaru mendeteksi titik panas di Riau mencapai 150 titik, dan 107 diantaranya adalah titik api karhutla
- 150 titik panas berada di 9 kabupaten
- Rokan Hilir terbanyak dengan 49 titik

Kabupaten	Titik Panas
Rokan Hilir	49
Pelalawan	30
Bengkalis	25
Meranti	16
Indragiri Hulu	13
Indragiri Hilir	13
Kampar	2
Kuansing	1

Karhutla di Riau

- Titik Api di Riau dengan level confiden di atas 70 persen mencapai 107 titik
- Paling banyak di Rokan Hilir dengan 37 titik
- BBPBD Riau mengungkapkan luas lahan yang terbakar di Riau dari Januari – awal September adalah 6.092 ha
- Wilayah yang baru terjadi kebakaran lahan ada di Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Bengkalis

Kabupaten	Titik Api
Rokan Hilir	37
Pelalawan	23
Bengkalis	21
Kepulauan Meranti	13
Indragiri Hulu	9
Indragiri Hilir	3
Kuantan Singingi	1

RESTORASI GAMBUT

Wewenang Terbatas BRG dalam Mandat Restorasi Gambut

- Target restorasi gambut 2,7 juta ha (1,7 juta ha lahan konsesi dan sisanya lahan nonkonsesi)
- Pada lahan nonkonsesi, BRG memiliki wewenang penuh untuk melakukan koordinasi langsung dalam program restorasinya.
- Dikerjakan bersama pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi
- Pada lahan konsesi, BRG diberi tugas melakukan supervisi.
- Lahan konsesi terbagi dua, yakni konsesi perkebunan dan konsesi kehutanan.
- Areal perkebunan di dalam target restorasi 555 ribu ha. Areal izin kehutanan hampir 1,2 juta ha

- BRG melakukan koordinasi dengan KLHK dan Ditjen Perkebunan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Akhir tahun lalu dibuat MoU dengan Ditjen Perkebunan untuk supervisi di areal kebun
- Supervisi pada konsesi kehutanan masih berada di KLHK dan BRG baru melakukan supervisi di lahan perkebunan
- BRG siap jika nantinya supervisi di lahan konsesi kehutanan diserahkan ke BRG
- Banyak pekerjaan rumah dari masa lalu yang kini harus diselesaikan oleh BRG, yaitu keterlanjuran seperti izin konsesi yang dasar hukumnya sudah sangat kuat

HUTAN ADAT



Penetapan Hutan Adat

- ✓ 5 September 2019 Presiden menyerahkan 5 SK Hutan Adat di Hutan Kota Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat
- ✓ Total luasnya 1.645 ha

Hutan Adat	Kabupaten	Luas (Ha)
Rage	Bengkayang	126
Gunung Temua	Bengkayang	151
Gunung Jalo	Bengkayang	258
Bukit Samabue	Landak	900
Binua Laman Garoh	Landak	210

- ✓ SK Penetapan Hutan Adat untuk Hutan Adat Bukit Samabue kepada Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Ilir di Desa Sepahat, Desa Menjalin dan Desa Lamoanak di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dengan luasan 900 ha.
- ✓ Selain itu Hutan Adat Binua Laman Garoh kepada Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh di Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dengan luasan 210 ha.

TORA



- Menko Perekonomian menyampaikan bahwa selama ini program sertifikasi tanah sudah berjalan baik
- Program sertifikasi ini juga diperuntukkan bagi tanah-tanah masyarakat yang dahulu mengikuti program transmigrasi yang belum selesai disertifikatkan di masa lalu.
- KLHK menerbitkan SK Menteri LHK Nomor:SK.8716/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III seluas 4.994.334 Hektar.
- Melalui Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang PPTKA, pemerintah menata ketimpangan struktur penguasaan tanah sehingga lebih berkadilan.
- Untuk meningkatkan tata kelola perkebunan sawit, pemerintah melakukan moratorium untuk perusahaan besar lewat Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018.

- Sampai saat ini telah diselesaikan penyediaan TORA dari kawasan hutan seluas 2.657.007 Ha atau 63% dari target yang pernah ditetapkan
- Terdiri dari beberapa kategori/kriteria:
 - ✓ Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 429.358 ha;
 - ✓ Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif seluas ± 938.878 ha;
 - ✓ Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas ± 39.229 Ha;
 - ✓ permukiman transmigrasi, pemukiman fasum-fasos, lahan garapan sawah dan tambak, Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian setempat seluas $\pm 1.249.542$ Ha yang tersebar pada 26 Provinsi.

- 5 September 2019 untuk pertama kalinya diserahkan Redistribusi Tanah dari pemerintah kepada Masyarakat, yang berasal dari Kawasan hutan.
- Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ini berasal dari hutan untuk masyarakat (SK Biru) seluas ±17.854,75 ha.
- Luasan tersebut tersebar pada 10 kabupaten

Propinsi	Kabupaten	Luas (Ha)
Kalimantan Barat	Sekadau	410,61
Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	469,47
Kalimantan Selatan	Balangan, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara	2.034,16
Kalimantan Tengah	Barito Utara dan Barito Selatan	14.940,51

- Penyerahan ini akan dilanjutkan untuk pencapaian target TORA dari Kawasan Hutan wilayah Kalimantan, yang meliputi 17 Kabupaten seluas 133.062,53 ha dengan rincian pembagian distribusi tanah seluas \pm 86.252,94 ha.
- Seluas 46.809,53 ha di selesaikan dengan Perhutanan Sosial yang bukan berupa sertifikat tetapi akses dan boleh menggunakan lahan Kawasan hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Sumber Berita

- <https://www.antaraneews.com/berita/1050208/ddpi-harapkan-pengurangan-emisi-karbon-sesuai-target>
- <https://bali.tribunnews.com/2019/09/07/malaysia-kirim-nota-diplomatik-desak-pemerintah-indonesia-urus-kebakaran-lahan?page=2>
- <https://rmco.id/baca-berita/kemen-lhk/17526/klhk-tingkatkan-kesiapsiagaan-atasi-kebakaran-hutan-di-bulan-september>
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/09/06/pxev9e416-brg-akui-sulit-capai-target-restorasi-gambut>
- <https://bisnis.tempo.co/read/1244545/palangkaraya-kucurkan-dana-rp-23-m-tangani-kebakaran-hutan/full&view=ok>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1047982/1645-hutan-adat-di-kalimantan-diserahkan-pemerintah>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1046316/presiden-serahkan-sertifikat-tora-dan-sk-hutan-adat-di-kalbar>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20190905/15/1145030/jokowi-serahkan-sk-hutan-adat-ke-masyarakat-adat-kalbar>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1047160/gggi-komitmen-kementerian-pemprov-kunci-kendalikan-perubahan-iklim>

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN
9.00 – 9.30 WIB**



@madaniberkelanjutan.id

Madani

